

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pemekaran daerah Kabupaten PALI dalam perspektif politik maka peneliti dapat, sedikitnya ada dua kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Pemekaran Kabupaten PALI pada awalnya berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat sendiri yang menginginkan adanya pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah dan perubahan yang signifikan. Melalui pemekaran Kabupaten PALI diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan dari segala lini aspek bukan hanya dari segi infrastruktur namun juga seluruh aspek pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi lapangan kerja sehingga aspirasi-aspirai yang dahulu dicita-citakan dapat dirasakan. Kendatipun demikian, pemekaran Kabupaten Pali bukan hanya muncul dari aspirasi dari masyarakat namun kepentingan politik ikut menyertai aspirasi tersebut untuk mendapat jabatan dan kekuasaan baru di institusi pemerintah.
2. Proses pemekaran Kabupaten PALI mengalami perjalanan yang sangat panjang mulai dari pembentukan FKKB- PALI dan Dewan Presidium” untuk mensosialisasikan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

3. Disamping itu juga, pemekaran Kabupaten PALI bukan hanya berasal dari masyarakat sendiri. Namun aspirasi tersebut didukung juga dari aspek seperti aspek yuridis, efektivitas dan efisiensi, dan aspek politis. Terlepas dari hasil di atas, proses dan aspirasi-aspirasi baik masyarakat sendiri dan aktor politik lainnya masih mendapatkan hambatan, disatu sisi yaitu faktor internal seperti adanya ketidaksamaan pandangan pada masyarakat dalam penentuan letak Ibu Kota dan disisi lain yaitu faktor eksternal dengan keluarnya peraturan dan kebijakan Menteri Dalam Negeri mengenai perlu adanya Moratorium untuk peninjauan daerah sebelum terbentuknya kabupaten baru.

B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti berikan lewat penelitian ini, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten PALI perlu mendengarkan keluhan dari seluruh masyarakat tentang pelayanan publik agar eksistensi masyarakat lebih terjamin dan kesejahteraan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Disamping itu juga, Pemerintah Kabupaten Pali diharapkan lebih mengoptimalkan seluruh kebijakan daerah untuk mencapai pertumbuhan perekonomian masyarakat lebih baik, seluruh pelayanan public diperbaiki dan akses insfratruktur agar perekonomian rakyat hidup demi terwujudnya nilai-nilai yang lebih baik.
2. Selain itu juga, pemerintah harus lebih fokus terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya alam demi

kesejahteraan bersama. Bukan hanya itu saja, namun pencapaian yang telah dijalankan oleh Kabupaten PALI diharapkan dipertahankan dan berusaha terus untuk memberikan pelayanan baik melalui sarana dan prasarana demi terwujudnya *good governance* sebagaimana konsep utilitarianisme Jeremy Bentham yaitu *the greatest happiness for the greatest numbers*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2019

Jalil Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, Farah Syah Rezah (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), cet, ke-1.

Makagansa (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : FUSPAD.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moh., Nazir, (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet, Ke-3.

Shah Anwar, (2006). *Local Governance Indeveloping Countries*, Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usulan Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari FKKB-PALI.

Skripsi atau Jurnal :

Andriani Eka (2008) ”*Dampak Pemekaran Daerah Kecamatan terhadap pelayanan publik (studi di Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi)*”. Ilmu Pemerintahan. h.1.

- Anwar Saeful, Skripsi: "*Pemekaran Wilayah Bone Selatan*" (Makassar, UHM, 2014) h. 2.
- Armanusahwati Maria. (2012). "*Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Rental Mobil Berdasarkan Asas Keseimbangan*". Universitas Kristen Maranatha.h.11-14
- Fikarwin Zuska (2012) "*Politik Etnisitas dalam Pemekaran Daerah*".Universitas Sumatera Utara. h.213.
- Hakim Abdul (2017) "*Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Kabupaten Bengkalis)*".Universitas Riau. h.856.
- Harmantyo Djoko (2007) "*Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*". Universitas Indonesia, hal 17.
- Marta Andri (2015) "*Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung)*".Universitas Lampung.h. 97.
- Muqoyyidin Wahyun Andik,(2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, hal 291-192.

Zulkarnain A Ariandi (2014) “*Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012*”. Universitas Riau. h. 13-14.

Internet :

Badan Pusat Statistik Kabupaten PALI, 2018

Pujiono Prayogo Imam, (2016) “*Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli*” diakses dari <http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html> , tanggal 3 Juli 2019.

Undang-Undang :

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 1 ayat 21).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>) diakses tanggal 30 September 2019.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah(<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22TAHUN1999UUPeni.htm>) di akses tanggal 30 September 2019.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

Instansi :

Arsip sekretariat Forum Komunikasi Keluarga Besar (FKKB) Kabupaten PALI.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Lampiran Kelima Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Presidium Pembentukan
Kabupaten PALI.

Wawancara :

Aang masyarakat desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Wawancara di desa
Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Bapak Achmad masyarakat desa Talang Ubi, Wawancara di Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bapak Suhandak masyarakat desa Talang Ubi, Wawancara di Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bapak Wardi masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4
Oktober 2019.

Bapak Yani masyarakat desa Tanah Abang, Wawancara di Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten PALI, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bapak Zul masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4 Oktober
2019.

Ibu Bili masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4 Oktober
2019.

Ibu (SM) masyarakat Kabupaten PALI, Wawancara di PALI, Jum'at, 4 Oktober
2019.

Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA.(Dewan kehormatan FKKB PALI) wawancara
di Palembang, Rabu, 25 September 2019.

H.Amri Achmad,SH.MM, Sekretaris FKKB PALI, Wawancara di Palembang,
Minggu, 15 September 2019.

H. Hasyim,S.E, M.Si Bendahara FKKB-PALI (Staff Khusus Kabupaten PALI),
Wawancara di Sekretariat, Jalan Kemang Manis, Palembang, Jum'at,
Tanggal 13 September 2019.

H. Nang Ali Solihin,SH. Penasehat Dewan Presidium PALI (Mantan Bupati
Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas), Wawancara di
Palembang, Minggu,tanggal 29 September 2019.

M.Mukhtar Jayadi,SH,Adv.,Ketua Bidang Perencanaan Presidium PALI (
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Minggu, 22 September 2019, di
Palembang.